

**MISPERSEPSI DALAM SENGGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN DAN PELUANG
DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA**
**MISPERCEPTION IN SOUTH CHINA SEA DISPUTE AND OPPORTUNITY FOR
INDONESIAN DEFENSE DIPLOMACY**

Yoedhi Swastanto¹, Rodon Pedrason², Yandry Kurniawan³, Muhammad Arif⁴

Universitas Pertahanan

(yoedhiswastanto@yahoo.com)

Abstrak--Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi dan mispersepsi antarnegara pengaku kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan, serta melihat peluang diplomasi pertahanan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini memiliki dua bagian analisis utama. Bagian pertama berisikan analisis mengenai persepsi dan mispersepsi negara-negara yang memiliki klaim kedaulatan di wilayah maritime yang berpotensi bereskalasi menjadi konflik kekerasan. Untuk bagian pertama ini peneliti akan menggunakan pendekatan persepsi dan mispersepsi dalam politik internasional. Bagian kedua berisikan analisis mengenai peluang diplomasi pertahanan Indonesia untuk meredam mispersepsi antarnegara dan meningkatkan sikap saling percaya untuk mencegah eskalasi konflik di wilayah maritim ini. Untuk bagian kedua ini peneliti akan menggunakan pendekatan diplomasi pertahanan. Secara akademik dan empirik, Penelitian ini akan berkontribusi memberikan alternative pemahaman dan masukan kebijakan terkait sengketa di Laut Tiongkok Selatan melalui analisis yang memiliki sandaran teoritik yang jelas (theory-informed analysis).

Kata Kunci: Laut Tiongkok Selatan, persepsi, mispersepsi, diplomasi pertahanan

Abstract--This study aims to understand the perception and misperception of the claimant states in the South China Sea disputes and examine the opportunities for Indonesia's defense diplomacy. Using qualitative method, this study proceeds with two main parts. The first part analyzes the prospect of conflict escalation caused by the perception and misperception among the claimant states in the South China Sea disputes. The authors employ perception and misperception approach in International Relations in the analysis. The second part of the study examines the opportunities for Indonesia's defense diplomacy in reducing the misperception, mitigating the conflict escalation as well as increasing mutual trust and confidence among the conflicting parties. In this second part, the authors make use of "defense diplomacy" as the conceptual tool. This study is academically and empirically significant as it contributes by giving alternative understanding on the South China Sea disputes as well as research-based and theory-informed policy recommendation.

Keywords: South China Sea, perception and misperception, defense diplomacy

¹ Major General (Army) Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A is Rector and lecturer in Defense Diplomacy Postgraduate Study Programme, Indonesia Defense University.

² Dr. rer.pol. Rodon Pedrason, M.A. is lecturer in Defense Management Postgraduate Study Programme, Indonesia Defense University.

³ Dr. phil. Yandry Kurniawan K., M.Si. M.S.S. is lecturer in Indonesia Defense University.

⁴ Muhamamd Arif, M.Sc. is a lecturer in Indonesia Defense University.

Latar Belakang: Diplomasi Pertahanan Indonesia

Sebagaimana disinggung di bagian sebelumnya, pendekatan diplomasi selama ini menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam menangani isu Laut Tiongkok Selatan. Sejumlah aktivitas diplomatik, baik bilateral maupun multilateral, telah dijalankan pemerintah Indonesia terutama sejak dekade 1990-an. Pada dekade 1990-an, misalnya, Indonesia menginisiasi *Workshop Process on Managing Potential Conflicts in the South China Sea*.

Meskipun tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa wilayah itu sendiri, inisiatif diplomatik ini telah berhasil mempromosikan dialog diantara pihak-pihak yang berkepentingan dan memulai proses pembangunan rasa saling percaya. Keberhasilan aktivitas diplomatik di era 1990-an ini dapat dilihat hasilnya pada penandatanganan Deklarasi Perilaku (*Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*) pada tahun 2002 yang kemudian menjadi dokumen referensi utama terkait pengelolaan potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan. Singkatnya, pendekatan diplomatik yang diambil Indonesia pada era 1990-an telah berhasil meletakkan fondasi upaya-upaya

pengelolaan dan penyelesaian potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan secara damai.

Memasuki abad ke-21, unsur-unsur pertahanan mulai memperkuat pendekatan diplomatik Indonesia di isu Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dimungkinkan dengan konsolidasi demokrasi dan reformasi sector keamanan yang mulai menampakkan hasilnya pada dekade 2000-an⁵. Perubahan doktrin telah memungkinkan TNI dan komunitas pertahanan untuk lebih melihat ke luar (*outward-looking*) dengan lebih memerhatikan dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan. Selain itu, kondisi perekonomian yang mulai membaik pada pertengahan 2000-an juga memungkinkan peningkatan anggaran secara konsisten untuk penguatan kekuatan dan kemampuan TNI. Kekuatan pertahanan maritim yang lebih mumpuni berfungsi menopang

⁵ Mengenai Reformasi Sektor Keamanan Indonesia lihat diantaranya Tim ProPatria, *Reformasi Sektor Keamanan Indonesia* (Jakarta: ProPatria, 2004); Ali A. Wibisono, Broto Wardoyo, and Yandry Kurniawan, *Satu Dekade Reformasi Militer* (Jakarta: PACIVIS-UI, 2008); Jurgen Ruland and Maria-Gabriela Manea, "The Politics of Military Reform in Indonesia and Nigeria," in *The Politics of Military Reform: Experiences from Indonesia and Nigeria*, ed. Jurgen Ruland, Maria-Gabriela Manea, and Hans Born (New York: Springer, 2013), 3–25.

aktivitas-aktivitas diplomatik Indonesia di isu Laut Tiongkok Selatan.

Perkembangan wacana diplomasi pertahanan di lingkungan komunitas pertahanan dapat dilihat, salah satunya, melalui buku putih pertahanan yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan. Buku Putih Pertahanan 2003 yang diberi judul *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*, yang merupakan buku putih pertama pasca Reformasi, belum menyebut istilah —diplomasi pertahanan. —Kekuatan diplomasi dan—kekuatan ekonomi masih ditempatkan bersama dengan —pertahanan negara sebagai upaya mewujudkan keamanan nasional⁶. Berselang lima tahun, Kementerian Pertahanan kembali merilis buku putih. Dalam penekanannya mengenai strategi pertahanan defensif aktif, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008* menyebutkan bahwa diplomasi adalah garis terdepan/menyinggung perihal pentingnya mengembangkan diplomasi pertahanan dengan mengedepankan bentuk kerjasama yang bersifat jangka panjang dengan negara-negara anggota ASEAN dan negara mitra melalui forum-forum multilateral seperti ASEAN Plus

⁶ Lihat *Buku Putih: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21* (Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2003).

Tiga, ASEAN Plus Enam dan ASEAN Regional Forum (ARF)⁷. Diplomasi pertahanan akhirnya mendapat perhatian yang cukup besar dalam *Buku Putih Pertahanan Indonesia* yang dirilis tahun 2015. Dalam buku putih ini, diplomasi pertahanan ditempatkan dalam kerangka pembinaan kemampuan pertahanan militer sebagai salah satu tugas Kementerian Pertahanan. Disinggung juga perihal diplomasi pertahanan sebagai upaya Indonesia untuk meredam konflik internasional dengan memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan diantara pihak yang terlibat dalam konflik⁸. Selain itu, diplomasi pertahanan juga dikedepankan melalui optimalisasi fungsi Atase Pertahanan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri serta kerjasama multilateral dan bilateral di bidang pertahanan⁹.

Setidaknya secara teoritis, diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia bertujuan untuk meminimalisir dampak dari mispersepsi diantara negara-negara yang

7

Lihat *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008* (Jakarta : Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008).

8

Buku Putih Pertahanan Indonesia (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), 32.

⁹ *Ibid.*, 40.

berkepentingan di Laut Tiongkok Selatan. Sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya, mispersepsi dapat mengakibatkan ketegangan atau bahkan konflik bersenjata antar negara ketika negara-negara tersebut saling menaksir terlalu tinggi ancaman yang dihadirkan satu sama lain. Ketiadaan informasi yang akurat terkait intensi membuat negara cenderung melekatkan —intensi pada —kapabilitas. Dengan kata lain, ketika suatu negara melihat negara lain melakukan peningkatan kekuatan militer, meskipun sebenarnya untuk keperluan defensif, hal tersebut biasanya dikaitkan dengan intensi bermusuhan (*hostility*) dan revisionis. Sebagai respon, negara pertama akan ikut meningkatkan kekuatan militernya sendiri. Akan tetapi, di banyak kasus negara-negara seringkali gagal memahami bahwa peningkatan kekuatan militernya juga dapat dilihat sebagai sinyal bermusuhan dari negara lain. Dengan kata lain, negara cenderung menganggap bahwa peningkatan kekuatan militernya sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan sambil melihat bahwa peningkatan kekuatan militer yang dilakukan oleh negara lain sebagai bentuk ancaman.

Dengan kata lain, melalui diplomasi pertahanan, Indonesia

mencoba untuk memperkecil peluang meningkatnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan dengan meningkatkan rasa saling percaya (*confidence-building measures*) dan transparansi terkait intensi dan kapabilitas diantara negara-negara yang berkepentingan. Peningkatan intensitas dan kualitas interaksi antara negara-negara yang bersengketa, setidaknya secara teoritis, dapat meminimalisir peluang terjadinya konflik akibat mispersepsi. Hal ini terutama penting mengingat pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, khususnya Tiongkok, selama ini diragukan intensinya.

Setidaknya sejak tahun 2003, pemerintah Tiongkok telah berupaya mempromosikan narasi —kebangkitan Tiongkok secara damai (*China's peaceful rise theory*) untuk menggantikan teori —ancaman Tiongkok (*China's threat theory*) yang sebelumnya mendominasi pemikiran di kalangan pengambil kebijakan negara-negara di kawasan¹⁰. Pada tahun 2011, pemerintah Tiongkok merilis satu dokumen yang khusus

¹⁰ Jian Yang, "The Rise of China: Chinese Perspectives," in *The Rise of China and International Security: America and Asia Respond*, ed. Kevin J. Cooney and Yoichiro Sato (New York: Routledge, 2009), 20.

membahas mengenai pembangunan Tiongkok secara damai¹¹. Disebutkan di dalam dokumen tersebut, antara lain, bagaimana pengalaman sejarah membuat Tiongkok sangat menghargai perdamaian dan kebutuhan akan pembangunan. Tujuan akhir dari diplomasi global Tiongkok adalah menciptakan lingkungan internasional yang stabil dan damai sehingga kondusif untuk melanjutkan pembangunan. Seirama dengan itu, dokumen *China's Military Strategy* yang dirilis tahun 2015 menekankan bahwa Tiongkok akan terus melanjutkan pembangunan secara damai, menjalankan kebijakan luar negeri yang independen untuk mewujudkan perdamaian, menerapkan kebijakan pertahanan yang defensif, melawan hegemonisme dan politik kekuatan (power politics) dalam bentuk apapun serta tidak akan pernah mencoba mewujudkan hegemoni dan ekspansi wilayah¹². Terakhir, dalam dokumen *China's Policies on Asia-Pacific Security Cooperation* pemerintah Tiongkok menekankan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa di Laut Tiongkok

¹¹ Lihat "China's Peaceful Development" (Beijing: The State Council Information Office of the People's Republic of China, 2011).

¹² "China's Military Strategy" (Beijing: The State Council Information Office of the People's Republic of China, 2015).

Selatan secara damai melalui proses negosiasi dan konsultasi; mencapai kesepakatan terkait aturan dan mekanisme pengelolaan sengketa, dan; menjaga perdamaian dan stabilitas serta kebebasan pelayaran dan penerbangan di Laut Tiongkok Selatan¹³. Tiongkok, dengan kata lain, percaya penguatan kapasitas pertahanan yang dilakukannya adalah tindakan yang alamiah dan seharusnya dapat dimengerti oleh negara-negara lain.

Sejumlah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok, namun demikian, membuat negara-negara di kawasan meragukan komitmen yang dimuat di dalam pernyataan-pernyataan resminya. Selain anggaran pertahanan yang terus meningkat dan pengadaan senjata-senjata ofensif seperti kapal induk, kapal selam dan pesawat tempur generasi teranyar, Tiongkok juga terus memperluas proyeksi kekuatannya. Sejak akhir 2013, Tiongkok telah secara intensif melakukan reklamasi di fitur-fitur yang didakunya di Kepulauan Spratly. Tiongkok meyakinkan negara-negara di kawasan bahwa proyek reklamasi di Kepulauan

¹³ Lihat The State Council of the People's Republic of China, "Full Text: China's Policies on Asia-Pacific Security Cooperation," 2017, http://english.gov.cn/archive/white_paper/2017/01/11/content_281475539078636.htm.

Spratly sepenuhnya dimaksudkan untuk tujuan-tujuan damai seperti operasi SAR, mitigasi bencana, penelitian maritim, observasi meteorologi dan tidak akan mengganggu kelancaran dan keamanan navigasi¹⁴. Dalam perkembangannya, proyek reklamasi di Kepulauan Spratly menimbulkan kekhawatiran di negara-negara lain di kawasan. Di atas pulau-pulau buatan ini Tiongkok menggelar sejumlah aset pertahanan seperti radar, sistem pertahanan udara, landasan pesawat dan pusat dukungan logistik. Instalasi militer ini diyakini dapat meningkatkan secara signifikan kemampuan militer Tiongkok untuk memperluas area operasinya di Laut Tiongkok Selatan dan sekitarnya¹⁵.

Penguatan postur pertahanan, sebagaimana disinggung diatas, memungkinkan pendekatan diplomatik yang diambil pemerintah Indonesia untuk menjamin perdamaian dan stabilitas regional didukung oleh kekuatan pertahanan yang semakin kuat. Dalam hal ini pemerintahan Joko Widodo berkomitmen untuk melanjutkan

rencana pewujudan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) yang sudah berjalan sejak 2005. Tujuan akhir dari program ini adalah membangun postur pertahanan yang terdiri dari *standby force*, *striking force* dan *peace-keeping operation* yang memiliki daya tangkal (*deterrence effect*) yang tinggi pada tahun 2024. MEF yang terdiri dari tiga tahap kini telah memasuki tahap kedua (2015-2019) dengan sejumlah penyesuaian seperti penekanan pada aspek maritime sesuai dengan agenda pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam kajiannya mengenai diplomasi pertahanan Indonesia, Gindarsah (2015) merekam rencana pewujudan MEF dalam tiga tahap sejalan dengan perkembangan regionalisasi di ASEAN dalam rangka menciptakan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN¹⁶.

Pembangunan kekuatan pertahanan maritim itu sendiri juga diuntungkan melalui upaya diplomasi pertahanan yang efektif. Selain untuk meningkatkan rasa saling percaya dan mencegah pecahnya konflik bersenjata di

¹⁴“Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying’s Regular Press Conference on April 9, 2015,” *Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China*, 2015.

¹⁵Ben Dolven et al., *Chinese Land Reclamation in the South China Sea: Implications and Policy Options*, CRS Report, 2015.

¹⁶Iis Gindarsah, *Indonesia’s Defence Diplomacy: Harnessing the Hedging Strategy Against Regional Uncertainties*, RSIS Working Paper, vol. 29 3, RSIS Working Paper (Singapore, 2015), 7.

kawasan, melalui diplomasi pertahanan yang mulai gencar dilakukan sejak periode 2000-an, Indonesia juga berupaya memperkuat kapabilitas pertahanannya melalui sejumlah kerjasama pertahanan serta pengembangan industri pertahanan¹⁷.

Bilateral

Dalam dua dekade terakhir Indonesia semakin aktif dalam membangun kedekatan melalui diplomasi pertahanan dalam kerangka kerjasama bilateral dengan negara-negara pendaku di Laut Tiongkok Selatan. Sebagaimana disebut di dalam Buku Putih Pertahanan 2015 yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan, kerjasama bilateral di bidang pertahanan dimaksudkan sebagai upaya merealisasi diplomasi pertahanan, yang penyelenggaraannya lebih dikembangkan untuk membangun saling percaya (*trust-building*) dan mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi perhatian¹⁸. Pewujudan rasa saling percaya ini berusaha dicapai dengan sejumlah program seperti kunjungan dan pertukaran personil,

latihan bersama, operasi militer terkoordinasi dan pengadaan serta pengembangan bersama sistem senjata¹⁹. Dalam periode 2009-2013, misalnya, Indonesia menjalin kerjasama yang cukup erat dengan dua negara pendaku di Laut Tiongkok Selatan yakni Tiongkok dan Malaysia.

Dengan Malaysia, Indonesia telah menjalin kerjasama pertahanan sejak waktu yang cukup lama. Kedua negara menandatangani perjanjian keamanan di wilayah perbatasan tahun 1972. Kepentingan bersama untuk mengamankan wilayah perbatasan antara kedua negara menjadi salah satu alasan utama intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Malaysia. Tercatat kedua negara menyelenggarakan sejumlah latihan dan operasi terkoordinasi di wilayah perbatasan. Bersama dengan Singapura, Indonesia dan Malaysia menyelenggarakan patroli terkoordinasi di Selat Malaka dalam kerangka Malacca Straits Sea Patrol (MSSP) sejak 2004. Untuk memperdalam pertukaran informasi dan intelijen, ketiga negara sepakat untuk memperluas kerjasama

¹⁷Lihat Idil Syawfi, "Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Negara: 2003-2008" (Universitas Indonesia, 2009).

¹⁸ Buku Putih Pertahanan Indonesia, 72.

¹⁹Gindarsah, *Indonesia's Defence Diplomacy: Harnessing the Hedging Strategy Against Regional Uncertainties*, 293:16.

dengan meluncurkan patroli udara terkoordinasi yang diberi sandi Eyes in the Sky pada tahun 2005 dan Intelligence Exchange Group (IEG) pada 2006. Pada bulan Juni 2017, menyusul sejumlah insiden perompakan dan penyanderaan, Indonesia dan Malaysia, bersama dengan Filipina, meluncurkan program patroli maritim terkoordinasi di Laut Sulu. Kerjasama pertahanan ini dimaksudkan untuk menerapkan model patroli terkoordinasi yang sudah berhasil dilakukan di Selat Malaka. Selain patroli perbatasan, Indonesia dan Malaysia juga aktif terlibat dalam latihan militer bersama termasuk Darsasa Malindo dan Malindo Jaya. Pada penyelenggaraan Malindo Jaya tahun 2014, angkatan laut Indonesia dan Malaysia melakukan latihan gabungan bersama yang melibatkan oseanografi, navigasi dan simulasi perang taktikal. Pasukan khusus dari kedua negara, Paskal dan Kopaska, juga dilibatkan dalam latihan tersebut. Melalui Malindo Jaya, kedua negara berharap dapat meningkatkan kompatibilitas antara personil angkatan laut untuk menghadapi ancaman-ancaman di laut. Pada tahun 2016, Indonesia dan Malaysia menggelar latihan bersama Darsasa Malindo di wilayah Kuantan dan Kuala Kemaman

yang berfokus pada penguatan kapasitas operasi kemanusiaan.

Langkah-langkah diplomasi pertahanan Indonesia dengan Malaysia, khususnya untuk pengamanan wilayah perbatasan maritim diantar kedua negara, selain memperkuat kapasitas operasional pengamanan maritim kedua negara juga berpotensi memperdalam transparansi terkait kepentingan nasional dan intensi negara-negara yang terlibat. Melalui patroli terkoordinasi di Selat Malaka dan Laut Sulu, diplomasi pertahanan Indonesia dapat telah memfasilitasi Malaysia untuk menunjukkan pada negara-negara di kawasan, termasuk para pendaku di Laut Tiongkok Selatan, bahwa kepentingan nasional utama yang ingin diamankan negara tersebut adalah terjaminnya lalu lintas maritim tanpa gangguan dari ancaman-ancaman trans-nasional di wilayah yurisdiksinya dan sekitarnya.

Diplomasi pertahanan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara pendaku di Laut Tiongkok Selatan juga dilakukan melalui kerjasama pengadaan sistem persenjataan. Sebagaimana disinggung di atas, kerjasama pengadaan persenjataan memberikan manfaat ganda bagi Indonesia. Pertama, sebagai bentuk diplomasi

pertahanan, kerjasama pengadaan persenjataan dapat meningkatkan rasa saling percaya dan transparansi. Hal ini dimungkinkan karena pembelian persenjataan biasanya diikuti dengan dukungan purna jual seperti pelatihan dan pemeliharaan. Dukungan pelatihan dan pemeliharaan berkala akan menjamin interaksi berkelanjutan antara Indonesia dengan negara pemasok senjata.

Kedua, kerjasama pengadaan dan pengembangan bersama sistem senjata mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam pembangunan kekuatan pertahanan.

Di antara negara-negara pendaku di Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok menjadi yang paling aktif menyuplai senjata ke Indonesia terutama sejak dekade 2000-an. Setidaknya sejak awal abad ke-21, Tiongkok terus mengurangi ketergantungannya terhadap impor senjata, terutama dari Rusia, dan memberikan perhatian lebih besar kepada produksi dalam negeri dan ekspor. Sebagaimana dicatat oleh Stockholm International Peace Research Institute, pangsa pasar senjata produksi Tiongkok naik dari 3,8% menjadi 6,2% antara periode 2007-2011 dan 2012-2016²⁰.

²⁰ SIPRI, "Increase in Arms Transfers Driven by Demand in the Middle East and Asia, Says

Tiongkok kini menjadi penyuplai senjata terbesar di dunia setelah AS dan Rusia²¹. Tiongkok menjadi salah satu pemasok utama sistem senjata Indonesia terutama untuk jenis peluru kendali anti kapal permukaan (*anti-ship missile*), rudal permukaan ke udara (*surface-to-air missile*) dan beberapa jenis radar maritim. Selain pembelian senjata, Indonesia dan Tiongkok juga merintis kerjasama pengembangan pesawat terbang tanpa awak dan rencana pembuatan precision guided bomb (PGB) kerjasama ALIT (*Aerospace Long-March International Trade*) dan PT. Pindad.

Selain dengan Tiongkok dan Malaysia, Indonesia juga aktif melakukan diplomasi pertahanan dengan negara-negara pendaku Laut Tiongkok Selatan yang lain. Memorandum saling pengertian antara pemerintah Indonesia dan Brunei di bidang pertahanan ditandatangani tahun 2003 dan telah diratifikasi tahun 2010. Angkatan Laut Indonesia saat ini mengoperasikan tiga korvet kelas Bung Tomo yang awalnya dibuat untuk angkatan laut Brunei. Kerjasama pertahanan dengan Filipina

SIPRI," Stockholm International Peace Research Institute, 2017, <https://www.sipri.org/media/press-release/2017/increase-arms-transfers-driven-demand-middle-east-and-asia-says-sipri>.

²¹ *Ibid.*

dimulai dengan nota kesepahaman mengenai pembentukan Komisi Bersama Indonesia-Filipina tahun 1993. Selanjutnya, kerjasama pertahanan Indonesia-Filipina terus ditingkatkan melalui persetujuan tentang kegiatan bersama di bidang pertahanan dan keamanan tahun 1997 yang telah diratifikasi tahun 2007. Seperti disinggung di atas, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Filipina terus menguat menyusul meningkatnya ancaman keamanan maritim trans-nasional di wilayah perbatasan kedua negara di Laut Sulu. Memorandum saling pengertian antara pemerintah Indonesia dan Vietnam tahun 2010 menjadi dasar penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara.

Latihan militer bersama selama ini menjadi salah satu cara paling efektif dalam kerangka diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara pendaku di Laut Tiongkok Selatan. Meskipun tidak secara khusus didesain dengan referensi sengketa Laut Tiongkok Selatan, sejumlah latihan bersama dengan negara-negara pendaku dinilai efektif untuk meningkatkan transparansi dan rasa saling percaya diantara militer negara-negara yang terlibat. Malaysia menjadi

rekan Indonesia yang paling aktif dalam melakukan latihan militer bersama. Kajian yang dilakukan oleh Gindarsah mencatat militer kedua negara menggelar enam jenis latihan militer bersama baik yang bersifat reguler maupun non-reguler. Sebagaimana disinggung di atas, latihan militer bersama dengan Malaysia, dan juga kemudian Filipina, yang sebagian besar difokuskan pada operasi-operasi pengamanan wilayah perbatasan maritim terhadap ancaman trans-nasional telah mampu menekankan kepentingan nasional negara-negara terlibat yang tidak bersifat ofensif. Jika dilihat dari bentuk latihan yang digelar, baik Indonesia, Malaysia maupun Filipina, memiliki kepentingan utama dan bersama untuk menjamin kelancaran navigasi di wilayah perbatasan dan sekitarnya dari ancaman-ancaman trans-nasional.

Multilateral

Selain melalui kerangka bilateral, diplomasi pertahanan juga dilakukan oleh Indonesia dalam kerangka multilateral. ASEAN, dan forum-forum turunannya, menjadi wadah utama diplomasi pertahanan Indonesia. Kajian yang dilakukan Gindarsah (2015) mencatat ASEAN menyelenggarakan rata-rata 75 pertemuan terkait

pertahanan dan keamanan dalam rentang waktu 2009-2014 dimana delegasi Indonesia memegang peranan aktif²². Jumlah ini naik signifikan dari rata-rata 12 pertemuan per tahun dalam rentang waktu 1994-2008²³.

Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (*ASEAN Defense Ministerial Meetings/ADMM*) dan ADMM-Plus menjadi salah satu forum diplomasi pertahanan utama dimana Indonesia aktif mengambil peran. ADMM dimaksudkan menjadi pusat (*hub*) interaksi antar institusi-institusi militer di ASEAN dan negara-negara mitra untuk mempromosikan rasa saling percaya dan saling berbagi informasi (*information-sharing*)²⁴. Dalam salah satu tujuannya, ADMM menyatakan pentingnya mempromosikan rasa saling percaya melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang ancaman-ancaman

keamanan dan pertahanan serta penguatan transparansi dan keterbukaan di antara negara-negara di kawasan. Melalui forum-forum ini, Indonesia mendiskusikan dengan negara-negara kawasan dan luar kawasan sejumlah isu-isu keamanan dan kerjasama praktikal di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama²⁵. Kepentingan untuk menghindari ketegangan di kawasan dan mempererat hubungan antar negara-negara di kawasan juga terlihat dari tujuan ADMM-Plus. Dalam pertemuan pertama ADMM-Plus, menteri-menteri pertahanan ASEAN dan negara mitra menyepakati lima area fokus kerjasama: keamanan maritim, kontra-terorisme, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, operasi penjaga perdamaian dan obat-obatan militer.

ASEAN Regional Forum (ARF) adalah forum multilateral lain yang dimanfaatkan oleh Indonesia untuk secara aktif mempromosikan rasa saling percaya dan diplomasi preventif di kawasan. Dalam rentang waktu 2009-2014, ARF menyelenggarakan rata-rata 19 pertemuan setiap tahunnya²⁶.

²² Gindarsah, *Indonesia's Defence Diplomacy: Harnessing the Hedging Strategy Against Regional Uncertainties*, 293:9.

²³ Evan A. Laksmana, "Indonesia's Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter?," *Contemporary Southeast Asia* 33, no. 2 (2011): 177. Lihat juga Evan A. Laksmana, "Defence Diplomacy in Southeast Asia: Trends, Prospects and Challenges," in *From "Boots" To "Brogues": The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia*, ed. Bhubhindar Singh and See Seng Tan (Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, 2011), 71-89.

²⁴ Gindarsah, *Indonesia's Defence Diplomacy: Harnessing the Hedging Strategy Against Regional Uncertainties*, 293:11.

²⁵ *Ibid.*, 293:1

²⁶ *Ibid.*, 293:13.

Dalam kaitannya dengan isu Laut Tiongkok Selatan, melalui forum-forum ASEAN Indonesia mempromosikan pentingnya mewujudkan tata kelola kawasan yang berbasis norma dan hukum internasional. Menyadari keterbatasannya sebagai negara non-pendaku, pemerintah Indonesia menaruh harapan pada sosialisasi norma dan perilaku untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan dan penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan antara negara-negara pendaku²⁷. Titik tolaknya adalah pemahaman bahwa perdamaian dan stabilitas di kawasan adalah bukan hanya kepentingan Indonesia sendiri, tapi juga kepentingan bersama seluruh negara di dalam dan luar kawasan²⁸. Meskipun secara institusional sulit untuk menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui mekanisme multilateral ASEAN, pemerintah Indonesia meyakini bahwa hal tersebut adalah peluang terbaik yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan untuk mengelola potensi

²⁷ Damos Dumoli Agusman, "Wawancara Dengan Dr. Damos Dumoli Agusman, Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum Dan Perjanjian Internasional" (Jakarta, 2017).

²⁸ *Ibid.*

konflik di Laut Tiongkok Selatan agar tidak tereskalasi²⁹.

Penekanan Indonesia pada hukum internasional dalam melihat sengketa di Laut Tiongkok Selatan dapat dipahami mengingat kedaulatan wilayah dan integritas teritorial Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan sendiri dijamin dan dilegitimasi oleh Hukum Laut Internasional³⁰. Penghormatan terhadap norma dan hukum internasional, dengan kata lain, bernilai strategis bagi Indonesia.

Selain dalam kerangka bilateral, Indonesia juga aktif melakukan diplomasi pertahanan melalui sejumlah latihan militer bersama multilateral. Sejak 2010, Indonesia ikut ambil bagian dalam latihan bersama maritim terbesar di dunia, Rim of the Pacific Exercise (RIMPAC). Diinisiasi oleh AS dan diadakan dua tahun sekali, RIMPAC juga diikuti oleh beberapa negara pendaku di Laut Tiongkok Selatan yaitu Filipina, Malaysia dan Tiongkok serta dua negara anggota ASEAN lain,

²⁹ Posisi diplomatik bahwa sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan isu kawasan dan internasional sebelumnya juga aktif dipromosikan oleh Filipina, terutama sebelum masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Lihat Charmaine G. Misalucha, "U.S.-Philippines Security Ties: Building New Foundation?," *Asian Politics & Policy* 8, no. 1 (2016): 51–61.

³⁰ Lihat John G. Butcher and R. E. Elson, *Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State* (Singapore: National University of Singapore Press, 2017).

Thailand dan Singapura. Selain RIMPAC, Indonesia juga berpartisipasi dalam latihan militer yang diinisiasi oleh AS dan Thailand yang diberi sandi Cobra Gold. Malaysia menjadi salah satu partisipan dalam Cobra Gold sementara Tiongkok, pada pelaksanaan tahun 2017, ikut serta sebagai salah satu pengamat.

Peluang Diplomasi Pertahanan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan

Indonesia memiliki kepentingan geostrategis yang besar di Laut Tiongkok Selatan. Potensi ketidakstabilan dan konflik bersenjata di Laut Tiongkok Selatan akibat mispersepsi coba ditanggulangi oleh Indonesia melalui serangkaian aktivitas diplomasi pertahanan baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. Kedepannya, terdapat sejumlah peluang bagi Indonesia untuk terus melanjutkan upaya mewujudkan kepentingan nasionalnya di Laut Tiongkok Selatan.

Pertama, posisi Indonesia sebagai negara non-pendaku memberikan ruang diplomatik yang relatif besar bagi Indonesia untuk terlibat aktif mengelola potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan melalui aktivitas diplomasi pertahanan. Secara diplomatik Indonesia dapat terus melanjutkan perannya sebagai *honest*

broker dalam menengahi negara-negara pendaku Laut Tiongkok Selatan.

Kedua, diplomasi pertahanan Indonesia yang lebih aktif di Laut Tiongkok Selatan didukung dengan arah kebijakan luar negeri yang semakin aktif dan *outward looking* terutama pada dua pemerintahan terakhir yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Kebijakan luar negeri yang proaktif dan *outward looking* ini dimungkinkan setelah konsolidasi politik dan demokratisasi yang terus menunjukkan tren positif dalam dua dekade terakhir. Krisis multidimensi dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada akhir dekade 1990-an memaksa untuk mengambil posisi defensif dalam kaitannya dengan politik luar negeri. Kondisi ekonomi yang terus membaik dan sistem politik demokrasi yang semakin dewasa memungkinkan pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap persoalan-persoalan luar negeri yang dianggap menjadi kepentingan nasional Indonesia. Hal ini misalnya ditunjukkan dengan aktivisme Indonesia dalam mewujudkan Komunitas ASEAN, forum-forum ekonomi seperti G20 serta inisiatif-inisiatif seperti Forum Demokrasi Bali. Dalam kaitannya dengan Laut Tiongkok Selatan, politik

luar negeri yang proaktif berarti kesiapan pemerintah Indonesia untuk memainkan peran lebih besar dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan.

Ketiga, terkait dengan poin kedua, politik luar negeri Indonesia yang proaktif juga didukung dengan kemampuan pertahanan yang semakin kuat. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan anggaran pertahanan sampai 1,5% dari PDB dan mencapai MEF pada tahun 2024 menjamin keberlangsungan agenda pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia. Dalam konteks diplomasi pertahanan, kemampuan pertahanan yang kuat memberikan kredibilitas lebih besar bagi diplomasi pertahanan Indonesia.

Keberlanjutan pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia mensyaratkan rencana program pengadaan sistem senjata yang berkelanjutan pula. Sembari terus mengupayakan kemandirian industri pertahanan, pewujudan postur pertahanan yang tangguh harus didukung dengan kerjasama pengadaan sistem senjata dengan negara-negara lain, terutama untuk sistem senjata yang teknologinya masih belum mampu

diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri. Kerjasama pengadaan senjata juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas produksi industri pertahanan dalam negeri melalui kerjasama alih teknologi.

Sebagaimana dijabarkan di bagian sebelumnya, diantara negara-negara pendaku di Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok menjadi salah satu rekan paling potensial bagi Indonesia dalam hal kerjasama pengadaan senjata. Penguatan kapabilitas produksi dalam negeri dan ekspor senjata Tiongkok seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dengan memperkuat kerjasama pengadaan senjata. Selain sistem radar dan rudal yang selama ini mendominasi kerjasama pengadaan senjata kedua negara, pemerintah Indonesia juga dapat mulai mempertimbangkan kerjasama pengadaan sistem senjata yang lebih rumit untuk mendukung pewujudan postur pertahanan maritim. Paling tidak sejak 2010, industri pembangunan kapal Tiongkok telah menjadi yang paling besar di dunia³¹. Program pembangunan kapal militer pun kemudian diuntungkan

³¹ Li Zhengyu, "Chinese Shipbuilding and Shipbuilding Capacity," Clarkson Research Institute, 2011, <https://www.marinemoney.com/sites/all/themes/marinemoney/forums/china11/chinapresentations/LiZhengyu.pdf>.

dengan penguatan kapasitas manufaktur kapal dalam negeri Tiongkok. Ekspansi dan modernisasi industri pembangunan kapal Tiongkok telah meningkatkan kapasitas produksi berbagai sistem senjata termasuk kapal selam, kapal perang permukaan, pesawat udara dan kapal angkut militer³². Diproyeksikan bahwa pada tahun 2020, Angkatan Laut Tiongkok (*People's Liberation Army Navy*) akan menjadi angkatan laut terbesar kedua di dunia, setelah AS, dengan bergantung pada industri galangan kapal dalam negeri³³.

Selain untuk memperkuat postur pertahanan maritim dan industri pertahanan Indonesia sendiri, dalam konteks diplomasi pertahanan kerjasama pengadaan senjata dengan Tiongkok juga dapat berfungsi sebagai bentuk engagement. Kerjasama pengadaan senjata yang intensif dan berkelanjutan dapat memperkuat rasa nyaman di pihak Tiongkok untuk berinteraksi dengan negara-negara yang

berkepentingan di Laut Tiongkok Selatan, termasuk negara-negara penduku. Selain itu, kerjasama pengadaan senjata, sebagaimana disinggung diatas, juga dapat mempromosikan norma-norma transparansi dan pembangunan rasa saling percaya. Asumsinya, semakin rumit sistem senjata yang dikerjasamakan dan di-alih-teknologi-kan, semakin besar pula transparansi dan rasa saling percaya diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Simpulan

Penelitian ini sudah menjelaskan sengketa di wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan meninjau persepsi satu negara atas klaim kedaulatannya di Laut Tiongkok Selatan maupun ketidakjelasan persepsi satu atau beberapa negara atas persepsi kedaulatan satu negara terhadap kawasan perairan ini. Hal ini penting untuk dielaborasi dan menjadi landasan penelitian ini yang membangun persepsi bahwa sengketa di Laut Tiongkok Selatan dapat dikelola dengan lebih baik apabila negara-negara di kawasan dapat melakukan upaya ini dengan memahami apa persepsi negara-negara yang berkepentingan di Laut Tiongkok Selatan. Selanjutnya, setelah dapat memahami persepsi masing-

³² Office of the Secretary of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2016 (Washington, D.C., 2016), 80.

³³ Andrew S. Erickson, "Steaming Ahead, Course Uncertain: China's Military Shipbuilding Industry," *The National Interest*, 2016, <http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/steaming-ahead-course-uncertain-chinas-military-shipbuilding-16266?page=2>.

masing negara yang berkepentingan tersebut, negara-negara di kawasan juga perlu untuk menemukan satu mekanisme yang dapat menciptakan saling kepercayaan antara satu pihak dengan pihak lain. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi negara-negara pendaku kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan dibangun berdasarkan faktor bukti sejarah, eksistensi aktivitas ekonomi dan pelaksanaan fungsi administratif (khususnya dalam konteks klaim Tiongkok, dan Vietnam) dan faktor legal, terutam setelah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS (khususnya dalam konteks klaim Filipina, Malaysia, dan Brunei).

Penelitian ini juga sudah menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah dengan memaksimalkan diplomasi pertahanan di antara negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini juga sudah menjelaskan argumen bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi memaksimalkan aktivitas diplomasi pertahanan adalah Indonesia, dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Indonesia bukan merupakan negara pendaku dalam sengketa LCS

sehingga dapat mempertahankan posisi netralnya di tengah benturan kepentingan negara-negara pendaku lainnya. Terkait dengan posisi netral ini, Indonesia telah berkampanye akan memainkan peran sebagai *honest broker* dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Kedua, Indonesia adalah *primus inter pares* di Asia Tenggara. Untuk masalah Laut Tiongkok Selatan, pemerintahan Beijing pada dasarnya bersengketa dengan negara-negara Asia Tenggara dan Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan tidak memiliki klaim kedaulatan di wilayah perairan ini. Hal ini sudah semestinya menjadi dasar bagi peran Indonesia yang lebih besar dalam mencari solusi damai sengketa Laut Tiongkok Selatan. Ketiga, Tiongkok tidak dapat menafikan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi terbesar dan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan. Dengan realitas ekonomi tersebut, Tiongkok juga membutuhkan Indonesia dan hal ini seharusnya sudah menjadi posisi tawar Indonesia dalam bernegosiasi mencegah konflik serta mencari solusi damai dengan Tiongkok. Keempat, Indonesia telah meningkatkan aktivitas diplomasi pertahanan sejak awal tahun 2000an dan karakter utama

diplomasi pertahanan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan antar-negara (*confidence building measures*).

Walaupun bukan merupakan negara pendaku, namun dinamika yang terjadi di kawasan ini menghasilkan setidaknya tiga persepsi ancaman keamanan bagi Indonesia, yang meliputi keamanan di Kepulauan Natuna, keutamaan UNCLOS, dan persaingan kekuatan besar ekstra regional. Berdasarkan potensi ancaman tersebut, kepentingan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan juga telah diidentifikasi menjadi tiga hal. Pertama, Indonesia berkepentingan untuk menjaga agar potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan dapat terkelola dan stabilitas kawasan dapat terjaga. Sebagai sebuah negara yang juga sedang tumbuh secara ekonomi, ketidakstabilan di kawasan, apalagi konflik bersenjata dalam skala besar, akan sangat merugikan Indonesia. Kedua, Indonesia berkepentingan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah dan integritas teritorial di tengah potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan. Meskipun tetap bersikukuh dengan posisi diplomatiknya sebagai bukan negara pendaku di sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan, para pengambil

kebijakan di Indonesia dan Tiongkok paham betul bahwa klaim wilayah Tiongkok tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan sekitar Kepulauan Natuna. Akibat tumpang tindih batas wilayah perairan tersebut, Indonesia telah mengalami kerugian yang tidak sedikit dari berbagai aktivitas ilegal di kawasan perairannya.

Dalam menghadapi berbagai masalah di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan diplomasi selama ini menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam menangani isu Laut Tiongkok Selatan. Sejumlah aktivitas diplomatik, baik bilateral maupun multilateral, telah dijalankan pemerintah Indonesia terutama sejak dekade 1990-an. Memasuki abad ke-21, unsur-unsur pertahanan mulai memperkuat pendekatan diplomatik Indonesia di isu Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dimungkinkan dengan konsolidasi demokrasi dan reformasi sector keamanan yang mulai menampakkan hasilnya pada dekade 2000-an. Perkembangan wacana diplomasi pertahanan pun mulai menjadi bahasan parenial di lingkungan komunitas pertahanan dapat dilihat, salah satunya, melalui buku putih pertahanan yang dirilis

oleh Kementerian Pertahanan. Bagi Indonesia, diplomasi pertahanan merupakan upaya Indonesia untuk meredam konflik internasional dengan memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan diantara pihak yang terlibat dalam konflik.

Secara teoritis, diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia bertujuan untuk meminimalisir dampak dari mispersepsi diantara negara-negara yang berkepentingan di Laut Tiongkok Selatan. Sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya, mispersepsi dapat mengakibatkan ketegangan atau bahkan konflik bersenjata antar negara ketika negara-negara tersebut saling menaksir terlalu tinggi ancaman yang dihadirkan satu sama lain. Oleh karena itu, melalui diplomasi pertahanan Indonesia mencoba untuk memperkecil peluang meningkatnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan dengan meningkatkan rasa saling percaya (*confidence-building measures*) dan transparansi terkait intensi dan kapabilitas diantara negara-negara yang berkepentingan.

Peningkatan intensitas dan kualitas interaksi antara negara-negara yang bersengketa, setidaknya secara teoritis,

dapat meminimalisir peluang terjadinya konflik akibat mispersepsi. Hal ini terutama penting mengingat pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, khususnya Tiongkok, selama ini diragukan intensinya.

Saran

Berdasarkan argumen dan temuan yang ada, penelitian ini menyampai beberapa saran sebagai berikut. Pertama, pertimbangan posisi Indonesia sebagai negara non-pendaku memberikan ruang diplomatik yang relatif besar bagi Indonesia untuk terlibat aktif mengelola potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan melalui aktivitas diplomasi pertahanan. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus melanjutkan perannya sebagai *honest broker* dalam menengahi negara-negara pendaku Laut Tiongkok Selatan. Kedua, Indonesia perlu melaksanakan diplomasi pertahanan yang lebih aktif dengan Tiongkok yang diselaraskan dengan arah kebijakan luar negeri yang semakin aktif dan *outward looking* terutama pada dua pemerintahan terakhir yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Ketiga, Indonesia perlu terus melanjutkan program transformasi militer dan modernisasi pertahanan yang telah ada

guna mendukung agar semakin efektifnya pelaksanaan diplomasi pertahanan. Dalam konteks diplomasi pertahanan, kemampuan pertahanan yang kuat memberikan kredibilitas lebih besar bagi diplomasi pertahanan Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008.
- Buku Putih: Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21. Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2003.
- Butcher, John G., and R. E. Elson. *Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State*. Singapore: National University of Singapore Press, 2017.
- Chung, C.P.C. (2015), —Drawing the U-shaped Line: China's Claim in the South China Sea, 1946-1974, *Modern China*, Vol. 42(1): 38-72.
- Cottey, Andrew and Anthony Forster, —Introduction, *The Adelphi Papers* 44, no. 365 (2004).
- Cottey, Andrew and Anthony Forster, —Chapter 1: Strategic Engagement: Defence Diplomacy as a Means of Conflict Prevention, *The Adelphi Papers* 44, no. 365 (2004).
- Bitzinger, Richard A., —A New Arms Race? Explaining Recent Southeast Asian Military Acquisitions, *Contemporary Southeast Asia* 32, no. 1 (2010): 50–69.
- Butcher, John G. and R. E. Elson, *Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State* (Singapore: National University of Singapore Press, 2017).
- Erickson, Andrew S., —America's Security Role in the South China Sea, *Naval War College Review* 69, no. 1 (2016): 40.
- Djalal, Hasjim, *Indonesia and the Law of the Sea* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995).
- Dolven, Ben, Jennifer K. Elsea, Susan V. Lawrence, Ronald O. Rourke, and Ian E. Rinehart. *Chinese Land Reclamation in the South China Sea: Implications and Policy Options*. CRS Report, 2015.
- Forster, Anthony, *Armed Forces and Society in Europe* (Basingtoke: PALGRAVE, 2006).
- Frederick, B.A. et.al., (2017) —The Issue Corrales of War Territorial Claims Data, 1816-2001, *Journal of Peace Research*, Vol. 54(1): 99-108.
- Gindarsah, Iis. *Indonesia's Defence Diplomacy: Harnessing the Hedging Strategy Against Regional Uncertainties*. RSIS Working Paper. Vol.293. RSIS Working Paper. Singapore, 2015.
- Jervis, Robert, "Perception, Misperception, and the End of the Cold War," dalam William Wohlforth (Ed.), *Witnesses to the End of the Cold War*, (Harvard: Johns Hopkins University Press, 1996).
- Jervis, Robert, —War and Misperception, *Journal of Interdisciplinary History* 18 No. 4 (1988): 675-700.
- Jervis, Robert, —Minimizing Misperception dalam G. Matthew Bohnam and Michael Shapiro (ed.), *Thought and Action in Foreign Policy*, (Basel: Birkauer Verlag, 1977)

- Jervis, Robert, *Perception and Misperception in International Politics* (Princeton: Princeton University Press, 1976), 58–113.
- Jervis, Robert, —Hypotheses in Misperception, *World Politics* 20 No. 3 (1968): 454-479; Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, —Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L. P. Marsudi Tahun 2017 (Jakarta, 2017).
- Kurniawan, Yandry, —Indonesia's View on 'One Belt One Road' Initiative: Hopes and Concerns. Makalah disampaikan dalam Konferensi The 21st Century Maritime Silk Road and Sino-Indonesia Strategic Cooperation, tanggal 25-26 April 2016 di Wuhan, Tiongkok.
- Laksmana, E. (2012) —Regional order by Other Means? Examining the Rise of Defense Diplomacy in Southeast Asia, *Asian Security*, Vol. 8(3): 251-270.
- Laksmana, Evan. —Indonesia's Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter? *Contemporary Southeast Asia* 33, no. 2 (2011): 157–82.
- Laksmana, Evan A. —Defence Diplomacy in Southeast Asia: Trends, Prospects and Challenges. In *From "Boots" To "Brogues": The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia*, edited by Bhubhindar Singh and See Seng Tan, 71–89. Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, 2011.
- Levy, Jack S., —Misperception and the Causes of War: Theoretical Linkages and Analytical Problems, *World Politics* 36, no. 1 (1983): 76–99.
- Malczewska, Klaudia, —Chinese Claim to the South China Sea under International Law, dalam D. Mierzejewski, K. Żakowski (editor) *On Their Own Paths: Japan and China Responses to the Global and Regional Challenges* (Łódź: Łódź University Press, 2015).
- Mearsheimer, John J. and Stephen M. Walt, —The Case for Offshore Balancing: A Superior U.S. Grand Strategy, *Foreign Affairs* 95, no.4 (2016): 70–83.
- Mearsheimer, John J., —China's Unpeaceful Rise, *Current History* 105, no. 690 (2006): 160–62.
- Mearsheimer, John J., *The Tragedy of Great Power Politics* (New York: W. W. Norton & Company, 2001).
- Ministry of Defence (2000) —Defence Diplomacy, The Ministry of Defence Policy Papers No.1, London: Directorate General Corporate Communication, MoD.
- Misalucha, Charmaine G. —U.S.-Philippines Security Ties: Building New Foundation? *Asian Politics & Policy* 8, no. 1 (2016): 51–61.
- Office of the Secretary of Defense. *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2016*. Washington, D.C., 2016.
- Parameswaran, Prashanth, *Playing It Safe: Malaysia's Approach to the South China Sea and Implications for the United States*, Maritime Strategy Series, Maritime Strategy Series (Washington, D.C., 2015).
- Pattiradjawane, Rene L., —Perilaku Ambiguitas Memicu Konflik Militer, *Kompas*, July 2, 2016.
- Pedrozo, Raul, —China versus Vietnam: An Analysis of the Competing Claims in the South China Sea. A CNA Occasional Paper (2014).
- Roach, J. Ashley. —Malaysia and Brunei: An Analysis of their Claims in the South China Sea. A CAN Occasional Paper (2014)

- Rosen, E. Mark, —Philippine Claims in the South China Sea: A Legal Analysis. CAN Occasional Paper (2014).
- Rüland, Jürgen, and Maria-Gabriela Manea. —The Politics of Military Reform in Indonesia and Nigeria. In The Politics of Military Reform: Experiences from Indonesia and Nigeria, edited by Jürgen Rüland, Maria-Gabriela Manea, and Hans Born, 3–25. New York: Springer, 2013.
- Sebastian, Leonard C., Ristian Atriandi Supriyanto, and I Made Andi Arsana, Indonesia and the Law of the Sea: Beyond the Archipelagic Outlook, National Security College Issue Brief (Canberra, 2014)
- Stein, Arthur A., —When Perception Matters, World Politics 34, no. 4 (1982): 505–26.
- Supriyanto, Ristian Atriandi, —Out of Its Comfort Zone: Indonesia and the South China Sea. Asian Policy Vol. 21 (2016). Syafwi, I. Analisis Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008), (Jakarta, Tesis Program Studi Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 2009).
- White, Ralph K., —Misperception and War, Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology 10 No. 4 (2004): 399.
- Wibisono, Ali A., Broto Wardoyo, and Yandry Kurniawan. Satu Dekade Reformasi Militer. Jakarta: PACIVIS-UI, 2008.
- Wiranto, Surya. —Wawancara Dengan Laksamana Muda TNI (Purn) Surya Wiranto, Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kemaritiman. Jakarta, 2017.
- Working Group on Security Sector Reform, Tim ProPatria. Reformasi Sektor Keamanan Indonesia. Jakarta: ProPatria, 2004
- Yang, Jian. —The Rise of China: Chinese Perspectives. In The Rise of China and International Security: America and Asia Respond, edited by Kevin J. Cooney and Yoichiro Sato, 13–37. New York: Routledge, 2009.
- Yoshihara, T. (2016), —The 1974 Paracels Sea Battle: A Campaign Appraisal, Naval War College Review, Vol. 69(2): 50.
- Zaki, Ahmad M. dan Mohd Aazizuddin M. Sani, —China's Assertive Posture in Reinforcing its Territorial dan Sovereignty Claim in the South China Sea: An Insight into Malaysia's Stance. Japanese Journal of Political Science Vol. 18(1) (2017).

Wawancara

- Agusman, Damos Dumoli. —Wawancara Dengan Dr. Damos Dumoli
- Agusman, Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum Dan Perjanjian Internasional. Jakarta, 2017.
- Jose Antonio Morato Tavares, —Wawancara Dengan Jose Antonio Morato Tavares, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Jakarta, 2017).
- James Kraska, —Wawancara Dengan Dr. James Kraskall (2017).

Media Online

- Azwar, Amahl, —Govt Looks to Approve East Natuna Bid, Jakarta Post, August 14, 2013, <http://www.thejakartapost.com/news/2013/08/14/govt-looks-approve-east-natuna-bid.html>.
- Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient, diakses melalui http://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1923_num_23_1_5946, 3 September 2017.

- Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) Purpose, functions and sessions, diakses melalui http://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_purpose.htm
- Erickson, Andrew S. —Steaming Ahead, Course Uncertain: China's Military Shipbuilding Industry. The National Interest, 2016. <http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/steaming-ahead-course-uncertain-chinas-military-shipbuilding-16266?page=2>. Historical documents on Vietnam's sovereignty over Paracel and Spratly islands, diakses melalui <http://english.vietnamnet.vn/fms/special-reports/9481/historical-documents-on-vietnam-sovereignty-over-paracel-and-spratly-islands.html>, 3 September 2017.
- National Development and Reform Commission—NDRC (2015), —Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road, Beijing, 28 Maret, http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html
- Oegroseno, Arif Havas, —Indonesia, South China Sea and the 11/10/9-dashed lines, Jakarta Post, 9 April, 2014, <http://m.thejakartapost.com/news/2014/04/09/indonesia-south-china-sea-and-11109-dashed-lines.html>.
- Robert D. Kaplan, —The South China Sea Is the Future of Conflict, Foreign Policy, 2011, <http://foreignpolicy.com/2011/08/15/the-south-china-sea-is-the-future-of-conflict/>.
- Denyer, Simon, —How China's Fishermen Are Fighting a Covert War in the South China Sea, The Washington Post, 2016, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/fishing-fleet-puts-china-on-collision-course-with-neighbors-in-south-china-sea/2016/04/12/8a6a9e3c-fff3-11e5-8bb1-f124a43f84dc_story.html?postshare=451460511139565&tid=ss_tw&utm_term=.56996a6f0d94.
- SIPRI. —Increase in Arms Transfers Driven by Demand in the Middle East and Asia, Says SIPRI. Stockholm International Peace Research Institute, 2017. <https://www.sipri.org/media/press-release/2017/increase-arms-transfers-driven-demand-middle-east-and-asia-says-sipri>.
- Supriyanto, Ristian Atriandi, —Indonesia's Natuna Islands: Next Flashpoint in the South China Sea? S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), RSIS Commentary, No. 033, 16 Februari 2015. <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2015/02/CO15033.pdf>. S. Mitchell, —Territorial Disputes, Oxford Bibliographies, 26 May 2016. Diakses melalui <http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0178.xml>, pada tanggal 6 April 2017.
- The State Council of the People's Republic of China. —Full Text: China's Policies on Asia-Pacific Security Cooperation, 2017. http://english.gov.cn/archive/white_paper/2017/01/11/content_281475539078636.htm. United Nations, —Permanent Mission of the Republic of Indonesia, no.480/POL-

- 703/VII/10, July 8, 2010
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/idn_2010re_mys_vnm_e.pdf.
- Vibhanshu Shekhar and Joseph Chiyong Liow, —Indonesia as a Maritime Power: Jokowi’s Vision, Strategies, and Obstacles Ahead, The Brookings Institution, 2014, <http://www.brookings.edu/research/articles/2014/11/indonesia-maritime-liow-shekhar>.
- Zhengyu, Li. —Chinese Shipbuilding and Shipbuilding Capacity. Clarkson Research Institute, 2011. <https://www.marinemoney.com/sites/all/themes/marinemoney/forums/china11/chinapresentations/LiZhengyu.pdf>.
- Brunei Maintains a Low Profile in Pressing Its South China Sea Claims. World Politics Review, diakses melalui <https://www.worldpoliticsreview.com/trendlines/17799/brunei-maintains-a-low-profile-in-pressing-its-south-china-sea-claims>
- Brunei, Silent Claimant in the South China Sea. Foreign Policy Association, diakses melalui <https://foreignpolicyblogs.com/2016/04/28/brunei-silent-claimant-south-china-sea/>
- China’s Military Strategy. Beijing: The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2015.
- China’s Peaceful Development. Beijing: The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2011.
- China claims territories of 23 countries, even though it only has borders with 14, China Daily Mail, diakses melalui <https://chinadailymail.com/2013/12/01/china-claims-territories-of-23-countries-but-only-has-borders-with-14/>, pada tanggal 6 Juni 2017.
- China’s Coast Guard Rams Fishing Boat to Free It from Indonesian Authorities, The New York Times, 21 Maret 2016, diakses melalui https://www.nytimes.com/2016/03/22/world/asia/indonesia-south-china-sea-fishing-boat.html?_r=0, pada tanggal 9 April 2017.
- Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying’s Regular Press Conference on April 9, 2015. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 2015.
- Foreign Ministry Spokesperson Hong Lei’s Regular Press Conference on November 12, 2015, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 12 November 2015, diakses melalui http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1314306.shtml, pada tanggal 9 April 2017.
- Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying’s Remarks on Indonesian Navy Vessels Harassing and Shooting Chinese Fishing Boats and Fishermen”, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 19 Juni 2016, diakses melalui http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1373402.shtml, pada tanggal 9 April 2017.
- Indonesia: A Bigger Role in the South China Sea? The Diplomat, 9 Juli 2014, diakses melalui <http://thediplomat.com/2014/07/indonesia-a-bigger-role-in-the-south-china-sea/>, pada tanggal 9 April 2017.
- Indonesia and China Clash in the South China Sea, World Political Review,

- 24 Maret 2016, diakses melalui <http://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/18297/indonesia-and-china-clash-in-the-south-china-sea>
- Indonesia Navy Fires on Chinese Fishing Boat, Injuring One, Beijing Claims, The Guardian, 19 Juni 2016, diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2016/jun/20/indonesian-navy-fires-on-chinese-fishing-boat-injuring-one-beijing-claims>, pada tanggal 9 April 2017.
- Inside China: China Clarifies Natuna Islands Sovereignty to Indonesia, The Washington Post, 19 November 2015, diakses melalui <http://www.washingtontimes.com/news/2015/nov/19/inside-china-china-concedes-natuna-islands-to-indo/>, pada tanggal 9 April 2017.
- Mapping the World’s Territorial Disputes, The Huffington Post, diakses melalui http://www.huffingtonpost.com/matrix-galka/mapping-the-worldsterrit_b_8637016.html, pada tanggal 6 April 2017.
- The ICOW Territorial Claims Data Set, diakses melalui <http://www.paulhensel.org/icowterr.html>, pada tanggal 6 Juni 2017.
- The Silent Claimant in the South China Sea. ASEAN Today, diakses melalui <https://www.aseantoday.com/2017/07/the-silent-claimant-in-the-south-china-sea/>
- Timeline: China’s Maritime Disputes, Council on Foreign Relations, diakses melalui <http://www.cfr.org/asia-and-pacific/timeline-chinas-maritime-disputes/p37249>, pada tanggal 8 April 2017.
- Timeline: South China Sea Dispute, Financial Time, 12 July 2016, diakses melalui <https://www.ft.com/content/aa32a224-480e-11e6-8d68-72e9211e86ab>, pada tanggal 8 April 2017.
- Shift as Vietnam Marks South China Sea Battle, BBC News, 15 Januari 2014, diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-asia-25709833>, pada tanggal 8 April 2017.
- South China Sea: The Case Against an ADIZ, The Diplomat, 13 September 2016 diakses melalui <http://thediplomat.com/2016/09/south-china-sea-the-case-against-an-adiz/>, pada tanggal 9 April 2017.
- Wang Yi Talks about China’s Four Point Consensus on South China Sea Issue with Brunei, Cambodia and Laos, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 2016, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1358478.shtml, pada tanggal 9 April 2017.
- Why is South China Sea Contentious? BBC, 12 July 2016, diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349>, pada tanggal 8 April 2017.